

DAMPAK PENURUNAN BANTUAN DOMESTIK TERHADAP KINERJA EKONOMI KOMODITAS PERTANIAN INDONESIA: ANALISIS SIMULASI KEBIJAKAN

Impact of Domestic Support Reduction on the Economic Performance of Agricultural Commodity in Indonesia: Policy Simulation Analyses

Helena J. Purba, Budiman Hutabarat, dan Sri Nuryanti

*Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Jalan A. Yani 70, Bogor 16161*

ABSTRACT

Agricultural negotiations in the World Trade Organization forum have been in deadlock until the recent Doha Round. Developing countries, represented by among others Indonesia and G-33, have persistently insisted that developed countries should also cut their tariffs and phase out their domestic support and export subsidies, but developed countries have not responded accordingly. This paper is an attempt to investigate several scenarios regarding tariff cut, domestic support and export subsidy reduction in developed and developing countries in order to predict its impacts on producer's and consumer's welfare and trade performance in both countries' groups. The analysis is done using the Agricultural Trade Policy Simulation Model (ATPSM). The study indicates that, if developed countries only reduce their tariff and domestic support without any reduction in export subsidy, the agriculture production and consumer surplus in developing countries would fall. Import and producer surplus in developing countries would increase. A fairer and healthier international trade liberalization would materialize if developed countries cut their tariffs and reduce their domestic support and export subsidies altogether. This has been proposed by G 20.

Key words: *domestic support, export subsidy, trade, policy*

ABSTRAK

Negosiasi pertanian dalam forum Organisasi Perdagangan Dunia sebelumnya dan sampai memasuki Putaran Doha saat ini masih mengalami kebuntuan. Negara berkembang yang antara lain diwakili Indonesia dan G 33 mendesak agar negara maju juga melakukan pemotongan tarif dan menurunkan bantuan domestik dan subsidi ekspor bagi produk pertanian mereka. Namun, sampai kini negara maju belum ingin memenuhinya. Tulisan ini merupakan kajian terhadap beberapa skenario penurunan tarif, bantuan domestik, dan subsidi ekspor di negara maju maupun berkembang dan menduga dampaknya terhadap kesejahteraan produsen, konsumen, dan kinerja perdagangan pertanian di negara maju maupun berkembang, termasuk Indonesia. Kajian ini menggunakan Model Simulasi Kebijakan Perdagangan Pertanian untuk menguji skenario kebijakan yang diusulkan. Hasil kajian menunjukkan bahwa, apabila pemotongan tarif negara maju hanya disertai dengan penurunan bantuan domestik saja akan berdampak pada penurunan produksi dan ekspor pertanian, peningkatan impor, dan merugikan

konsumen di negara berkembang. Liberalisasi perdagangan dunia yang adil dan sehat hanya akan tercapai apabila negara maju melakukan pemotongan tarif disertai dengan penurunan bantuan domestik dan subsidi ekspor sekaligus sesuai dengan proposal usulan G 20.

Kata kunci: *bantuan domestik, subsidi ekspor, perdagangan, kebijakan.*

PENDAHULUAN

Selama perundingan pertanian di Forum Komisi Pertanian di Jenewa sejak awal tahun 2000 sampai dengan saat ini, telah dihasilkan beberapa kerangka atau *framework* yang nantinya akan menjadi modalitas. Beberapa modalitas tersebut antara lain adalah Draft 1 Harbinson, Rumus Gabungan/RG (*Blended Formula/BF*), dan Rumus Berjenjang/RB (*Tiered Formula/TF*). Di dalam Draft Harbinson terdapat rancangan pengurangan Kotak Jingga (*Amber Box*) sebesar 60 persen dari yang telah diikat (*bound*) dalam *Aggregate Measurement Support/AMS* selama 5 tahun.

Sebelum sidang Konferensi Tingkat Menteri V di Cancun Meksiko bulan September 2003, Amerika Serikat/AS dan Uni Eropa/UE, dua anggota Organisasi Pertanian Dunia/OPD (*World Trade Organization/WTO*) dan merupakan adikuasa di bidang ekonomi dan militer di dunia, melakukan pertemuan dan membuat kesepakatan yang kemudian menghasilkan Rumus Gabungan/RG. RG adalah campuran Rumus-Putaran Uruguay/R-PU (*Uruguay Round-Formula/UR-F*), Rumus Swiss/RS (*Swiss Formula/SF*), dan liberalisasi penuh. Memang bahan dalam teks yang dibawa ke Cancun itu masih berupa kerangka kerja dan bukan rincian tentang modalitas. Apabila kerangka itu disetujui, maka kemudian baru melangkah untuk menyusun modalitas (Hutabarat *et al.*, 2005).

Sampai saat ini telah ada beberapa usulan tentang modalitas penurunan, khususnya untuk tarif seperti usulan-usulan Kelompok Negara 10 (K 10), K 20, *ACP (African, Caribbean, and Pacific) Countries*, UE, dan Australia serta AS yang masih harus melalui pembahasan lebih lanjut menjelang atau saat Konferensi Tingkat Menteri VI di Hongkong bulan Desember ini. Hal ini didasari oleh Pasal 20 dalam Perjanjian Pertanian/PP (*Agreement on Agriculture/AoA*) yang menyatakan "...penurunan cepat dalam bantuan dan perlindungan yang menyebabkan perubahan mendasar adalah suatu proses yang terus berjalan, sehingga para anggota menyetujui bahwa perundingan untuk melanjutkan proses tersebut akan dimulai setahun sebelum masa pelaksanaannya..." ("*...substantial progressive reductions in support and protection resulting in fundamental reform is an on going process, members agree that negotiations for continuing the process will be initiated one year before the implementation period...*") [WTO, 2004], yang diharapkan akan ditutup pada tahun 2005 untuk disusunnya PP yang baru.

Sampai saat penelitian ini dimulai, titik temu tentang modalitas di setiap pilar belum juga didapatkan. Pertemuan tingkat menteri di Hongkong juga belum menelurkan kesepakatan. Tentu saja PP yang baru tidak akan dihasilkan dan modalitas penurunan di setiap pilar juga tidak akan dicapai. Sidang komisi pertanian yang akan datang terus dilakukan sampai dicapai kesepakatan atau PP akan gagal karena persetujuan tidak tercapai. Untuk itu, diperlukan informasi dan data tentang posisi danantisipasi dampak berbagai kebijakan dan kesepakatan perdagangan internasional terhadap komoditas dan sumber daya pertanian dalam negeri. Selain itu, Indonesia sebagai anggota OPD sama seperti negara-negara lain juga berkewajiban melaporkan komitmennya, khususnya dalam hal Bantuan Domestik/BD (*Domestic Support/DS*) untuk pertanian sebagaimana disepakati dalam PP. Untuk itu, Indonesia perlu melakukan perhitungan BD untuk setiap unsur-unsur pendukungnya seperti dirinci dalam Annex 2-4 PP.

Bersamaan dengan ini, sejak diterimanya konsep Produk Khusus/PK (*Special Product/SP*) dan Mekanisme Pengamanan Khusus/MPK (*Special Safeguard Mechanism/SSM*) bagi NB oleh Komisi Pertanian dalam sidangnya di Jenewa pada bulan Juli 2004, Indonesia juga perlu mengisi untuk mengamankan komoditas pertaniannya sendiri dan komoditas pertanian kelompok, yaitu K 33 (Group 33/G 33). Hal ini pun memerlukan kajian yang komprehensif dan mendalam agar benar-benar usulannya optimal dan kondusif bagi perkembangan sektor pertanian domestik.

METODOLOGI

Kerangka Pemikiran

Pada saat ini tarif impor (*applied*) yang berlaku di Indonesia adalah berbagai besaran yang diusulkan dalam *LOI (Letter of Intent)* antara pemerintah Indonesia dengan Dana Moneter Internasional/DMI (*International Monetary Fund/IMF*) bagi beragam komoditas. Sementara itu, dengan akan berakhirnya masa berlaku PP yang dihasilkan OPD tahun 1994, maka perlu dipersiapkan analisa kritis mengenai skema-skema modalitas penurunan tarif, BD, dan SE yang dilakukan Indonesia dan beberapa mitra dagangnya, sebagaimana diamanatkan dalam PP OPD 1994.

Pada perundingan Komisi Pertanian, Juli 2004, di Jenewa, yang menghasilkan Paket Juli 2004, telah tersurat bahwa modalitas penurunan BD dan tarif akan mengikuti Rumus Berjenjang/RB dan sampai saat ini belum diketahui bagaimana bentuk pasti jenjang tarif yang diharapkan. Hal ini mengundang perdebatan tajam seperti perundingan modalitas pada sebelumnya yang akhirnya untuk sementara mengesampingkan rumus-rumus yang dikembangkan sebelumnya, seperti Rumus Putaran Uruguay/R-PU, Rumus Swiss/RS, atau Rumus Gabungan/RG.

Untuk BD, tiga kotak yang mendapat perhatian utama adalah Kotak Jingga (*Amber Box*), Kotak Hijau (*Green Box*), dan Kotak Biru (*Blue Box*). Untuk pertanian, semua kebijakan BD yang mempengaruhi produksi dan perdagangan dimasukkan dalam Kotak Jingga. Bantuan yang tidak mengganggu atau hanya sedikit mempengaruhi perdagangan dikelompokkan dalam Kotak Hijau. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 PP OPD, semua BD harus dikurangi, kecuali bantuan yang memenuhi syarat yang dinyatakan dalam Pasal ini dan dalam Lampiran 2 PP. Tekad pemotongan ini bagi semua negara anggota harus dinyatakan dalam *Total Aggregate Measurement of Support* dan *Annual and Final Bound Commitment Levels*”.

Kemudian Paket Juli 2004 mencatat bahwa: (1) semua NM akan melakukan pemotongan cukup besar dalam tingkat BD yang mengganggu pasar, (2) AMS Total akhir (Kotak Jingga) yang diikat dan tingkat *de minimis* yang diijinkan juga akan mengalami pemotongan cukup besar dan untuk Kotak Biru, akan dipatok pada nilai tertinggi sebagaimana dirumuskan dalam Alinea 15; (3) landasan penurunan AMS Total ditambah *de minimis* yang diijinkan dan Kotak Biru yang disepakati akan mengikuti Rumus Berjenjang/RB.

Untuk BD, K 20, AS, dan UE mengusulkan ada tiga jenjang dan rentang BD bagi NM yang sama, tetapi pemotongan bantuan domestiknya berbeda-beda. Namun, ketiga kelompok ini sepakat bahwa BD yang tinggi mengalami penurunan yang lebih tinggi (Tabel 1).

Tabel 1. Usulan Jenjang dan Pemotongan Bantuan Domestik K 20, Amerika Serikat, dan Uni Eropa

Jenjang bantuan domestik (juta dolar AS)	Pemotongan (%)		
	K 20	Amerika Serikat	Uni Eropa
BD>60	80	75	70
0<BD≤60	75	53	60
BD≤10	70	31	50

Dalam pilar subsidi dan persaingan ekspor tercakup banyak aspek yang sifatnya berbeda antara satu dan yang lain. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 PP, subsidi ekspor/SE (*Export Subsidy/ES*) yang harus diturunkan, antara lain: (a) bantuan subsidi langsung pemerintah atau lembaganya berupa pembayaran natura kepada perusahaan, industri, produsen pertanian, koperasi atau asosiasi produsen, atau lembaga pemasaran; (b) penjualan atau penampungan stok hasil pertanian yang tidak dikomersialkan untuk tujuan ekspor oleh pemerintah atau lembaganya dengan harga di bawah harga barang yang sama di dalam negeri, (c) pendanaan untuk ekspor hasil pertanian demi kegiatan pemerintah, (d) pemberian subsidi untuk mengurangi biaya pemasaran ekspor produk pertanian, (e) pembiayaan angkutan di dalam negeri dan pengapalan untuk ekspor, dan (f) subsidi produk pertanian yang termasuk dalam produk ekspor.

Berkaitan dengan subsidi dan persaingan ekspor, masih terdapat perbedaan yang tajam antara negara berkembang/NB dan NM, sesama NB, dan sesama NM. Banyak negara menyatakan bahwa berbagai bentuk SE perlu diperketat, seperti bantuan pangan (*food aid*), kredit ekspor bersubsidi, asuransi, dan perdagangan oleh perusahaan pemerintah. Namun, mereka belum sepakat tentang apakah bentuk-bentuk di atas mempunyai pengaruh sebesar subsidi langsung. Beberapa NB yang kecil berpendapat bahwa SE harus dihapus, tetapi dalam waktu yang lebih panjang untuk membantu mereka melakukan penyesuaian menghadapi perubahan karena biaya impor mereka akan lebih tinggi.

Dalam Kerangka Agustus 2004 dikatakan bahwa semua bentuk SE harus dihilangkan pada waktu yang dapat dipercaya. Penghapusan ini akan dilakukan sejajar dengan semua jenis subsidi, termasuk yang ada pada kredit ekspor yang dibantu pemerintah, bantuan pangan, dan monopoli ekspor yang diawasi pemerintah. Sebagai penerapan Perlakuan Khusus dan Berbeda, NB memperoleh keringanan antara lain waktu yang lebih panjang dan dapat melanjutkan subsidi angkutan dan pemasaran (Pasal 9.4 PP) "untuk masa yang tepat dan akan dirundingkan", di luar waktu berakhirnya subsidi utama. Pada saat yang sama, apabila anggota menghapus unsur kredit dan asuransi bersubsidi, mereka harus mampu menghindari dampak negatifnya bagi negara-negara kurang berkembang dan pengimpor pangan.

Usulan yang masuk saat ini untuk persaingan ekspor berasal dari K 20, UE, dan AS. K 20 mengusulkan adanya penghapusan SE sebelum 2010, UE mengusulkan penghilangan seluruh SE jika tercapai "*full parallelism*", dan AS menginginkan: (i) penghapusan SE untuk semua produk pada 2010 dan lebih cepat pada produk tertentu, (ii) program kredit ekspor pemerintah agar sesuai dengan sistem kredit komersial untuk menghindari SE, (iii) pajak ekspor diferensial dihentikan. Untuk butir yang terakhir ini banyak NB yang tidak menerimanya, seperti tercermin dalam Kerangka Agustus 2004 yang termasuk di dalam isu-isu lain pada Butir 49 yang memuat: "*Issues of interest but not agreed: sectoral initiatives, differential export taxes, GIs*" (WTO, 2004).

Metode Analisis

Analisis dengan *the Agricultural Trade Policy Simulation Model*//ATPSM digunakan untuk menjawab isu-isu tentang BD. Model ini merupakan model global keseimbangan parsial komparatif statik yang memiliki sifat-sifat seperti: (1) Suatu sistem persamaan untuk semua negara, yang mengandung respon volume penawaran, permintaan, ekspor, dan impor terhadap perubahan-perubahan harga pasar dunia, pada keadaan seperangkat perubahan dukungan harga, mekanisme transmisi harga, dan struktur pasar tertentu; (2) Penentuan pengaruh volume, penerimaan perdagangan, dan kesejahteraan negara (kelompok), dan komoditas (kelompok) karena perubahan kebijakan; (3)

Pendugaan besaran dan sebaran penerimaan tarif dan keuntungan kuota tarif di antara berbagai negara; (4) Penyajian hasil dugaan dalam berbagai dimensi seperti negara (kelompok atau region), komoditas, skenario kebijakan, dan peubah ekonomi.

Model ini mempunyai ciri bahwa harga dalam negeri adalah fungsi harga pasar dunia dan perlindungan perbatasan atau aturan-aturan pendukung dalam negeri yang khusus. Semua aturan proteksi dinyatakan dalam setara nilai tarif. Dengan mengasumsikan bahwa sebuah negara seringkali adalah pengimpor atau pengekspor satu (agregat) barang, tarif gabungan dihitung untuk menentukan harga konsumsi dan produksi dalam negeri. Angka ini diperoleh dengan membagi volume ke dalam tiga kelompok, yaitu impor, ekspor, dan produksi yang ditawarkan ke pasar dalam negeri (S_d). Pertama, tarif pasar dalam negeri (t_d) dihitung sebagai rata-rata terbobot dua pajak perdagangan, angka SE (t_x) dan tarif impor (t_m), dimana pembobotnya adalah ekspor (X) dan impor (M):

$$t_d = (X t_x + M t_m) / (M + X) \dots\dots\dots (1)$$

Kemudian tarif konsumsi (pasar dalam negeri) dihitung sebagai rata-rata terbobot tarif impor (t_m) dan tarif pasar dalam negeri (t_d) dimana pembobotnya adalah impor (M) dan penawaran dalam negeri (S_d):

$$t_c = (M t_m + S_d t_d) / D \dots\dots\dots (2)$$

Dengan cara yang sama, tarif penawaran (pasar dalam negeri) dihitung sebagai rata-rata terbobot tarif impor (t_m) dan tarif pasar dalam negeri (t_d) dimana pembobotnya adalah ekspor (X) dan penawaran dalam negeri (S_d) ditambah tarif penawaran dalam negeri (t_p):

$$t_s = (X t_x + S_d t_d) / S + t_p \dots\dots\dots (3)$$

Dengan demikian sistem persamaan untuk semua negara sebenarnya adalah empat persamaan berikut ini, yang memperlihatkan konsumsi dalam negeri, produksi, ekspor, dan impor:

$$\widehat{D}_{i,r} = \eta_{i,i,r} [\widehat{P}_{wi} + (1 + \widehat{t}_{Ci,r})] + \sum_{\substack{j=1 \\ i \neq j}}^J \eta_{i,j,r} [\widehat{P}_{wj} + (1 + \widehat{t}_{Cj,r})] \dots\dots\dots (4)$$

$$\widehat{S}_{i,r} = \varepsilon_{i,i,r} [\widehat{P}_{wi} + (1 + \widehat{t}_{Pi,r})] + \sum_{\substack{j=1 \\ i \neq j}}^J \varepsilon_{i,j,r} [\widehat{P}_{wj} + (1 + \widehat{t}_{Pj,r})] \dots\dots\dots (5)$$

$$\Delta X_{i,r} = \gamma_{i,r} \Delta S_{i,r} \dots\dots\dots (6)$$

$$\Delta M_{i,r} = D_{i,r} \widehat{D}_{i,r} - S_{i,r} \widehat{S}_{i,r} + \Delta X_{i,r} \dots\dots\dots (7)$$

dimana ΔD , ΔS , ΔX dan ΔM masing-masing melambangkan permintaan, penawaran, ekspor dan impor, Δ melambangkan perubahan relatif dan Δ perubahan mutlak, P_w melambangkan harga dunia, t_c tarif konsumsi dalam negeri dan t_s tarif produksi dalam negeri, $\varepsilon_{ij,r}$ elastisitas penawaran dan $\eta_{ij,r}$ elastisitas permintaan i dan j adalah indeks komoditas dan r adalah indeks negara. Dengan mengolah D , S , X , M , dan P_w ke dalam vektor berdimensi 6300 ($175 * 36$) kali 1, sistem persamaan di atas dapat disederhanakan dan diselesaikan melalui pembalikan matriks. Komoditas dan kelompok komoditas pertanian yang dicakup dalam ATPSM dapat dilihat pada Lampiran tulisan ini.

Bagi perdagangan lingkup kawasan ASEAN dan ASEAN +3, tingkat penurunan tarifnya telah dipublikasikan, sehingga penelitian ini langsung menggunakan angka-angka tersebut untuk menduga dampaknya terhadap indikator-indikator yang menjadi perhatian, seperti kesejahteraan produsen, konsumen, produksi, ekspor, dan impor, serta kesejahteraan masyarakat, sedangkan bagi perdagangan multilateral modalitas penurunan tarif, BD, dan SE sampai saat ini belum dapat ditentukan karena adanya perbedaan pandangan yang tajam baik antara NB dan NM, sesama NB, dan sesama NM, sehingga masih tetap dirundingkan sampai saat ini. Oleh karena itu, digunakan simulasi dari berbagai skenario seperti dikemukakan dalam uraian berikut ini.

Sedangkan perlakuan terhadap pilar BD disimulasi menurut tiga skenario, yaitu Usulan K 20, Usulan AS, dan Usulan UE, yang masing-masing terdiri atas 3 jenjang untuk NM dan NB. Berdasarkan hasil beberapa kali pembicaraan dan penelusuran dari berbagai pertemuan, diperoleh informasi tentang berbagai usulan penurunan BD seperti yang ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Usulan Penurunan Bantuan Domestik (%)

Jenjang/tier BD	Usulan K 20		Usulan AS		Usulan UE	
	NM	NB	NM	NB	NM	NB
BD > 60	80	53	75	50	70	47
10 BD ≤ 60	75	50	53	35	60	40
BD ≤ 10	70	47	31	21	50	33

Sumber: Hasil beberapa pertemuan Komisi Pertanian, 2005.

Namun, paket ATPSM tidak menyediakan format untuk penurunan BD berdasarkan jenjang seperti pada pilar akses pasar. Oleh karena itu, dilakukan analisis simulasi untuk NM dan NB berdasarkan penurunan BD secara rata-rata dan dimodifikasi sehingga terdapat tujuh skenario sebagai berikut: (1) NM menurunkan BD 75 persen, NB tetap; (2) NM menurunkan BD 53 persen, NB tetap; (3) NM menurunkan BD 60 persen, NB tetap; (4) NM menurunkan BD 100 persen, NB tetap; (5) NM dan NB menurunkan BD 75 persen dan 50 persen; (6) NM dan NB menurunkan BD 53 persen dan 35 persen; dan (7) NM dan NB menurunkan BD 60 persen dan 40 persen. Sedangkan pilar SE tidak dilakukan penurunan baik untuk NM maupun NB.

Berbagai usulan modalitas telah diajukan selama perundingan di forum OPD yang bertujuan untuk menciptakan suatu tatanan perdagangan dunia yang lebih adil, baik oleh NM dan NB. Namun, usulan ini tidak terlepas dari keinginan dan kepentingan untuk melindungi masyarakat di negara atau kelompoknya sendiri. Salah satu usulan yang diajukan untuk menjadi modalitas dalam skema penurunan tarif, BD, dan SE adalah usulan Harbinson yang digunakan untuk melakukan kajian simulasi. Selain itu, terdapat juga Usulan K 20 dengan tiga jenjang penurunan tarif dengan tingkat pemotongan yang lebih besar kepada NM tanpa penurunan BD dan SE. Skenario alternatif kebijakan tersebut dirinci seperti pada Tabel 3. Skenario tersebut digunakan untuk mensimulasi dan menganalisis dampaknya terhadap kinerja ekspor, impor, produksi, dan impor komoditas penting Indonesia.

Tabel 3. Skenario Simulasi Penurunan Tarif menurut Usulan Harbinson dan K 20

Jenjang/tier BD	Pemotongan Tarif Berdasarkan			
	Negara Maju		Negara Berkembang	
	Jenjang	Pemotongan (%)	Jenjang	Pemotongan (%)
Harbinson 1*				25
Tanpa pemotongan	15	40	20	30
SE dan BD	90	50	60	35
		60	120	40
Harbinson 2*				
Dengan pemotongan				25
SE(NM=80%; NB=70%)	15	40	20	30
BD(NM=60%; NB=20%)	90	50	60	35
		60	120	40
	20	45		25
Usulan K 20**	50	55	30	30
	75	65	80	35
		75	130	40

Keterangan: * Sumber: Handbook ATPSM Versi 3 (www.unctad.org)

** Sumber: Laporan Pertemuan Cairns Group dan G-20 di Jenewa, September 2005 (PTRI, 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Resiprokal Berbagai Modalitas Bantuan Domestik di Indonesia

Keikutsertaan Indonesia di dalam OPD selama kurun waktu 10 tahun telah memberi arti penting bagi peran Indonesia. Terbukti dengan ditetapkannya Indonesia sebagai koordinator K 33 yang terdiri dari negara-negara berkembang

yang bertugas memperjuangkan kepentingan NB, khususnya menyangkut produk khusus dan mekanisme perlindungan khusus. Isu BD telah mendominasi setiap pertemuan baik di tingkat komisi pertanian maupun Konferensi Tingkat Menteri (KTM).

Dirangkum dalam Tabel 4, hasil simulasi ATPSM atas ketujuh skenario seperti dikemukakan dalam metodologi. Berisi analisis agregat dampak penurunan BD terhadap distribusi kesejahteraan bagi mitra dagang Indonesia di NM dan NB, terhadap Indonesia sendiri, serta terhadap harga dunia atas komoditas pertanian. Secara umum hasil semua skenario tersebut mempunyai arah yang sama untuk NM, NB, dan Indonesia. Dari besarnya dampak terhadap distribusi kesejahteraan juga tidak banyak berbeda, meskipun pada beberapa skenario NB juga telah menurunkan BD-nya.

Tabel 4. Dampak Beberapa Skenario terhadap Harga Dunia dan Distribusi Kesejahteraan (juta AS\$)

Skenario	Kelompok Negara	Surplus Konsumen	Surplus Produsen	Kesejahteraan Total	Perubahan Harga Dunia (%)
NM menurunkan BD 75%, NB tetap	NM	32.088,54	- 48.336,40	11.210,30	69
	NB	447,92	1.836,71	2.043,38	
	Indonesia	- 442,96	391,03	- 47,41	
NM menurunkan BD 53%, NB tetap	NM	32.146,38	- 39.770,48	10.478,71	69
	NB	495,32	1.791,48	2.049,98	
	Indonesia	- 440,83	389,04	- 47,31	
NM menurunkan BD 60%, NB tetap	NM	32.127,98	- 42.521,14	10.687,90	69
	NB	480,23	1.805,87	2.0477,88	
	Indonesia	- 441,51	389,67	- 47,34	
NM menurunkan BD 100%, NB tetap	NM	15.440,04	- 46.893,04	8.826,74	68
	NB	16.029,85	- 9.043,06	5.137,30	
	Indonesia	- 495,43	444,73	- 47,92	
NM dan NB menurunkan BD 75% dan 50%	NM	32.088,53	- 48.336,40	11.210,30	69
	NB	447,89	- 2.322,16	2.313,88	
	Indonesia	- 442,96	391,03	- 47,41	
NM dan NB menurunkan BD 53% dan 35%	NM	32.146,38	- 39.770,47	10.478,71	69
	NB	495,30	- 1.175,68	2.182,22	
	Indonesia	- 440,83	389,04	- 47,31	
NM dan NB menurunkan BD 60% dan 40%	NM	32.127,97	- 42.521,14	10.687,90	69
	NB	480,21	- 1.563,85	2.220,76	
	Indonesia	- 441,51	389,67	- 47,34	

Sumber: Hasil Simulasi ATPSM versi 3.

Apabila NM melakukan liberalisasi dengan penurunan BD sebesar 75 persen atas produk ekspornya sedangkan NB tetap (penurunan tarif menurut Proposal Harbinson dan SE tidak diturunkan), berdampak positif bagi konsumen di NM dan NB, karena mereka menikmati peningkatan surplus sebesar 32 milyar dolar AS dan 447 juta dolar AS. Namun, bagi konsumen Indonesia kebijakan ini berdampak negatif karena surplusnya turun sebesar 442 juta dolar AS. Dari sisi

produsen, kebijakan ini justru mendatangkan kerugian di NM, mereka harus kehilangan surplus sebesar 48,34 milyar dolar. Hasil ini menunjukkan bahwa sungguh sangat besar perlindungan dalam bentuk BD yang diberikan oleh NM kepada produsennya dan inilah yang menjadi penyebab timbulnya ketidakadilan pasar dan antarpelaku ekonomi di pasar internasional. Sebagai contoh, tahun 1999-2000 BD di negara UE mencapai 87,89 milyar dolar AS. Di Indonesia, penurunan BD NM ini mendatangkan keuntungan bagi produsen dalam negeri dengan meningkatnya surplus sebesar 391 juta dolar AS. Kondisi ini dapat menjadi insentif bagi produsen/pengusaha Indonesia untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri yang menjadi komoditas ekspor. Bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan, liberalisasi ini mendatangkan kerugian sebesar 47 juta dolar AS.

Tidak berbeda dengan penurunan BD oleh NM sebesar 75 persen, liberalisasi penurunan BD sebesar 53 persen, 60 persen, dan 100 persen memberi dampak yang sama. Kesimpulannya juga sama apabila dilakukan kombinasi penurunan BD antara NM dan NB sesuai usulan K 20, AS, dan UE. Tampaknya, negara-negara berkembang harus terus berjuang menyerukan penurunan BD oleh NM agar tercipta keadilan bagi pelaku ekonomi di pasar global. Telah saatnya juga NM membuka pasar domestiknya dengan mengurangi bahkan menghapuskan sama sekali BDnya terutama dalam kotak jingga (*Amber box*) yang menjadi komponen utama di dalam model ATPSM.

Semua skenario alternatif kebijakan liberalisasi menyebabkan peningkatan harga dunia, namun besarnya perubahan harga tersebut cenderung sama, yaitu sebesar 69 persen. Bila harga dunia naik, tentunya juga akan merugikan konsumen di negara pengimpor termasuk Indonesia yang juga masih sebagai pengimpor sebagian komoditas pertanian. Sebaliknya, produsen atau negara pengekspor sangat diuntungkan. Oleh karena itu, Indonesia harus dapat memperbaiki kinerja perdagangan dengan meningkatkan jumlah dan mutu produksi dalam negeri, agar pada tingkat tertentu mampu memenuhi kebutuhan sendiri tanpa menggantungkan kebutuhan dari pasar dunia. Hasil simulasi ini juga seiring dengan studi yang menyimpulkan bahwa liberalisasi memberi dampak yang besar terhadap peningkatan harga dunia (Diao *et al.*, 2001 dalam Vanzetti, 2002).

Dampak Berbagai Modalitas Bantuan Domestik terhadap Kinerja Ekspor, Impor, Produksi, dan Konsumsi Komoditas Penting di Indonesia

Penelitian perdagangan internasional dengan model ATPSM untuk kasus Indonesia belum banyak dilakukan. Hal ini mungkin disebabkan oleh model ATPSM yang bersifat statis karena model ini tidak dapat menghitung keuntungan dan kerugian dalam distribusi kesejahteraan yang dinamik (kesejahteraan yang dihasilkan masih secara relatif). Di samping itu, model ini juga belum memasukkan peubah pendapatan (*income*) yang dapat menjadi indikator agregat untuk mengukur manfaat ekonomi perubahan suatu kebijakan

perdagangan. Tiga skenario yang dicoba dalam subbagian ini adalah (1) Harbinson 1, tanpa pemotongan SE dan BD; (2) Harbinson 2, dengan pemotongan SE (NM = 80 persen; NB = 70 persen), BD (NM = 60 persen; NB = 20 persen); dan (3) Usulan K 20.

Dampak terhadap Produksi Pertanian Indonesia

Dampak liberalisasi pemberlakuan atas tiga alternatif skenario terhadap produksi komoditas pertanian dirangkum dalam Tabel 5. Semua skenario memberi dampak positif terhadap produksi pertanian Indonesia. Meskipun simulasi skenario Harbinson 1 (tanpa penurunan terhadap BD dan SE) dan Usulan K 20 memberi hasil yang sama baik arah dan besaran untuk semua komoditas. Perbedaan jenjang dan pemotongan tarif yang tidak besar antara NM dan NB tidak memberi pengaruh nyata. Perubahan produksi akibat perubahan kebijakan perdagangan dengan skenario Harbinson 2 (dengan penurunan BD dan SE untuk NM dan NB) lebih besar dari Harbinson 1.

Tabel 5. Dampak Liberalisasi terhadap Kinerja Produksi Pertanian Indonesia (%)

Komoditas	Harbinson 1	Harbinson 2	K 20
Binatang hidup	0,42	0,53	0,42
Daging sapi	0,00	0,00	0,00
Daging kambing/domba	0,69	0,58	0,69
Daging babi	0,56	0,87	0,56
Unggas	0,70	0,83	0,70
Susu konsentrat	0,49	1,96	0,49
Gandum	0,00	0,00	0,00
Beras	0,51	0,58	0,51
Jagung	0,30	0,48	0,30
Kacang-kacangan	0,47	0,49	0,47
Tomat	2,30	2,35	2,30
Umbi-umbian	0,71	0,79	0,71
Apel	0,00	0,00	0,00
Jeruk	2,09	2,14	2,09
Pisang	1,36	1,48	1,36
Gula kasar	1,48	2,12	1,48
Gula halus	2,16	3,14	2,16
Biji kopi	0,05	0,08	0,05
Kopi bubuk	0,47	0,48	0,47
Biji coklat	0,03	0,05	0,03
Coklat halus	0,23	0,33	0,23
Teh	0,35	0,56	0,35
Daun tembakau	0,00	0,37	0,00
Tembakau olahan	0,00	0,00	0,00
Minyak kelapa	0,19	0,16	0,19
Karet	0,00	0,00	0,00
Minyak nabati	0,13	0,14	0,13

Sumber: Hasil Simulasi ATPSM versi 3.

Ada tiga komoditas penting yang mengalami perubahan nyata dalam produksinya, yaitu tomat, jeruk, dan gula halus. Penurunan tarif menurut Harbinson tanpa pemberlakuan penurunan BD dan SE, akan terjadi kenaikan produksi tomat (2,30 persen), jeruk (2,09 persen), dan gula halus (2,16 persen), apabila disertai penurunan BD dan SE (Harbinson 2) kenaikannya masing-masing sebesar 2,35 persen, 2,14 persen, dan 2,12 persen. Kenaikan produksi ini disebabkan turunnya harga secara global akibat penurunan tarif bea masuk di NM dan NB sekaligus. Namun, daging sapi, gandum, apel, tembakau (primer dan olahan), serta komoditas karet yang menjadi salah satu komoditas utama ekspor Indonesia tidak menunjukkan perubahan produksi sama sekali.

Dampak terhadap Konsumsi Pertanian Indonesia

Di Indonesia, penerapan ketiga skenario liberalisasi perdagangan tidak menguntungkan bagi konsumen, perubahannya bernilai negatif (Tabel 6). Penurunan yang tajam terjadi pada komoditas gandum (4,13 persen), susu konsentrat (2,61 persen), dan pisang (2,53 persen) pada skenario Harbinson 1 tanpa penurunan BD dan SE. Sedangkan bila disertai dengan penurunan BD sebesar 60 persen oleh NM dan 20 persen oleh NB serta penurunan SE 80 persen oleh NM dan 70 persen oleh NB (Harbinson 2), konsumsi atas beberapa komoditas akan menurun secara tajam, yaitu susu konsentrat (10,62 persen), gandum (5,38 persen), dan teh (3,44 persen).

Telah dikemukakan di muka, produksi pertanian akan meningkat dengan kedua kebijakan ini. Keadaan sebaliknya berlaku di sisi konsumsi. Semestinya penurunan tarif, BD, dan SE menyebabkan harga yang diterima konsumen menjadi lebih murah sehingga konsumsi juga meningkat. Namun berbeda kondisinya untuk barang impor. Penurunan BD dan SE oleh NM menyebabkan harga produsen lebih mahal dan mempengaruhi harga impor bagi negara pengimpor barang yang bersangkutan. Ini merupakan salah satu kelemahan model ATPSM. Model ini tidak merinci secara jelas apakah Indonesia sebagai pengeksport atau pengimpor karena simulasi dilakukan bagi agregat komoditas pertanian dan mitra dagangnya juga bersifat agregat, NM, dan NB.

Dampak terhadap Ekspor Pertanian Indonesia

Pemberlakuan kebijakan perdagangan atas ketiga skenario tersebut efektif bagi kinerja ekspor Indonesia karena mendatangkan dampak yang positif dengan peningkatan volume ekspor yang sangat tajam, terutama pada skenario Harbinson 1. Penurunan tarif di NM dan NB tanpa disertai penurunan BD dan SE saja telah mendongkrak volume ekspor Indonesia. Bila Indonesia ingin melindungi petani produsen dalam negeri, tampaknya harus lebih giat untuk memperjuangkan penurunan tarif di berbagai fora OPD.

Tabel 6. Dampak Liberalisasi terhadap Kinerja Konsumsi Pertanian Indonesia (%)

Komoditas	Harbinson 1	Harbinson 2	K 20
Binatang hidup	-0,08	-0,09	-0,08
Daging sapi	-0,92	-2,51	-0,92
Daging kambing/domba	-1,76	-1,44	-1,76
Daging babi	-0,99	-1,46	-0,99
Unggas	-1,51	-1,77	-1,51
Susu konsentrat	-2,61	-10,62	-2,61
Gandum	-4,13	-5,38	-4,13
Beras	-0,54	-0,69	-0,54
Jagung	-0,42	-0,67	-0,42
Kacang-kacangan	-0,39	-0,40	-0,39
Tomat	-1,00	-1,02	-1,00
Umbi-umbian	-1,19	-1,31	-1,19
Apel	-2,19	-2,38	-2,19
Jeruk	-0,88	-0,90	-0,88
Pisang	-2,53	-2,75	-2,53
Gula kasar	-1,16	-1,66	-1,16
Gula halus	-2,17	-3,14	-2,17
Biji kopi	-0,02	-0,08	-0,02
Kopi bubuk	-0,37	-0,27	-0,37
Biji coklat	-0,02	-0,03	-0,02
Coklat halus	0,00	0,00	0,00
Teh	-1,99	-3,44	-1,99
Daun tembakau	-0,88	-0,93	-0,88
Tembakau olahan	0,00	0,00	0,00
Minyak kelapa	-1,10	-1,09	-1,10
Karet	0,00	0,00	0,00
Minyak nabati	-0,60	-0,67	-0,60

Sumber: Hasil Simulasi ATPSM versi 3.

Hasil simulasi liberalisasi perdagangan memperlihatkan ekspor pertanian Indonesia melebihi 100 persen, bahkan ada yang mencapai ribuan persen. Volume ekspor daging babi meningkat tajam sebesar 202 ribu persen (Tabel 7). Daging babi merupakan salah satu komoditas ekspor Indonesia yang memiliki pangsa yang besar. Komoditas lain yang mengalami peningkatan volume ekspor adalah pisang (59 ribu persen), daging kambing/domba (31 ribu persen), gula halus (6 ribu persen), gula kasar (4 ribu persen), dan jeruk (1.500 persen). Analisis *trend* ekspor Indonesia selama 10 tahun dari 1993–2003 juga memperlihatkan bahwa pisang segar merupakan komoditas ekspor utama Indonesia. Perhatian khusus terhadap komoditas ini sangat diperlukan terutama peningkatan mutu. Temuan lain adalah kebijakan tersebut kurang efektif pengaruhnya terhadap komoditas perkebunan, yaitu coklat, teh, dan tembakau. Bahkan untuk komoditas karet tidak berpengaruh sama sekali yang ditunjukkan oleh perubahan ekspor yang bernilai nol.

Tabel 7. Dampak Liberalisasi terhadap Kinerja Ekspor Pertanian Indonesia (%)

Komoditas	Harbinson 1	Harbinson 2	K 20
Binatang hidup	670,11	0,53	670,11
Daging sapi	92,00	0,91	92,00
Daging kambing/domba	31.593	18.340	31.593
Daging babi	201.916	299.176	201.916
Unggas	1.230	1.380	1.230
Susu konsentrat	2,86	1,96	2,86
Gandum	756,44	0,00	756,44
Beras	539,17	0,58	539,17
Jagung	388,87	0,48	388,87
Kacang-kacangan	31,99	0,49	31,99
Tomat	1.355	1.058	1.355
Umbi-umbian	14,24	6,05	14,24
Apel	595,38	0,00	595,38
Jeruk	1.543	2,14	1.543
Pisang	59.025	64.143	59.025
Gula kasar	4.857	6.935	4.857
Gula halus	6.409	3,14	6.409
Biji kopi	0,08	0,08	0,08
Kopi bubuk	3,10	0,48	3,10
Biji coklat	0,04	0,05	0,04
Coklat halus	0,30	0,33	0,30
Teh	2,92	0,56	2,92
Daun tembakau	3,52	0,37	3,52
Tembakau olahan	0,00	0,00	0,00
Minyak kelapa	53,49	0,16	53,49
Karet	0,00	0,00	0,00
Minyak nabati	0,83	0,38	0,83

Sumber: Hasil Simulasi ATPSM versi 3.

Berdasarkan simulasi skenario diketahui bahwa Harbinson 1 dan Usulan K 20 hasilnya sama, sementara skenario Harbinson 2 memberi hasil yang lebih besar namun arah dan jenis komoditas yang terbesar adalah sama. Pilihan kebijakan yang efektif untuk kinerja ekspor Indonesia dan informasi menyeluruh sangat bermanfaat. Kekurangan analisa model ATPSM adalah bersifat status, sehingga pilihan kebijakan yang dijatuhkan berdasarkan hasil simulasi bisa tidak konsisten.

Dampak terhadap Impor Pertanian Indonesia

Berbeda dengan kinerja ekspor, semua skenario liberalisasi perdagangan menyebabkan turunnya volume impor Indonesia (Tabel 8). Di satu sisi volume ekspor meningkat tajam dan di sisi lain impor menurun. Kondisi ini diinginkan karena kenaikan volume ekspor disertai juga penurunan volume impor akan mengurangi ketergantungan terhadap pasar dunia dan menghemat devisa.

Tabel 8. Dampak Liberalisasi terhadap Kinerja Impor Pertanian Indonesia (%)

Komoditas	Harbinson 1	Harbinson 2	K 20
Binatang hidup	-0,07	-8,06	-0,07
Daging sapi	0,00	-2,48	0,00
Daging kambing/domba	-1,76	-100,00	-1,76
Daging babi	-0,99	-100,00	-0,99
Unggas	-1,51	-100,00	-1,51
Susu konsentrat	0,00	-4,63	0,00
Gandum	0,00	-5,35	0,00
Beras	-0,54	-60,55	-0,54
Jagung	-0,42	44,07	-0,42
Kacang-kacangan	-0,39	-8,58	-0,39
Tomat	-1,19	-100,00	-1,19
Umbi-umbian	-1,00	-100,00	-1,00
Apel	0,00	-2,37	0,00
Jeruk	-0,18	-21,01	-0,18
Pisang	-2,53	-100,00	-2,53
Gula kasar	0,80	-100,00	0,80
Gula halus	-2,17	-13,64	-2,17
Biji kopi	-0,02	-6,02	-0,02
Kopi bubuk	-0,37	-21,93	-0,37
Biji coklat	-0,22	-0,31	-0,22
Coklat halus	0,00	-0,80	0,00
Teh	-1,99	-16,00	-1,99
Daun tembakau	-0,88	-3,77	-0,88
Tembakau olahan	0,00	0,00	0,00
Minyak kelapa	0,06	-45,59	0,06
Karet	0,00	0,00	0,00
Minyak nabati	-0,60	-100,00	-0,60

Sumber: Hasil Simulasi ATPSM versi 3.

Dampak yang besar diperoleh bila liberalisasi dengan skenario Harbinson 2 diterapkan. Hasil simulasi memperlihatkan penurunan volume impor beberapa komoditas penting secara drastis sampai 100 persen terutama komoditas peternakan yang terdiri dari daging kambing/domba, daging babi dan unggas; buah-buahan meliputi tomat, umbi-umbian dan pisang, gula halus, dan minyak nabati. Informasi ini sangat berguna bagi industri gula di dalam negeri karena kebijakan ini dapat memperbaiki kinerja pergulaan nasional dengan tidak ada impor gula sama sekali. Jelaslah bahwa BD oleh NM dan NB terhadap industri gulanya cukup tinggi.

Penurunan volume impor komoditas beras juga sangat berarti (60,55 persen) bagi Indonesia dengan penerapan kebijakan Harbinson 2. Penurunan tarif yang tidak disertai dengan penurunan BD dan SE seperti yang diusulkan oleh Harbinson 1 dan K 20 tidak memberi arti penting bagi keberasan nasional. Itulah sebabnya komoditas gula dan beras termasuk yang sangat dilindungi dan masuk dalam daftar sensitif tinggi di lingkungan ASEAN termasuk Indonesia

yang jadwal penurunan tarifnya ditunda sampai tahun 2010 dan ditentukan secara spesifik.

Dampak terhadap Distribusi Kesejahteraan

Di dalam model ATPSM kesejahteraan total dihitung berdasarkan penjumlahan dari surplus produsen, surplus konsumen, dan penerimaan pemerintah. Bagian ini menjelaskan ringkasan dari dampak semua skenario alternatif kebijakan yang telah dikemukakan di muka terhadap tiga kelompok negara (NM, NB, dan Indonesia).

Liberalisasi perdagangan lebih banyak memberi keuntungan bagi NM, melalui peningkatan kesejahteraan total terutama skenario Harbinson 2, sebaliknya NB dirugikan. Penurunan tarif bea masuk akan menurunkan surplus produsen negara yang mengenakan tarif, sebaliknya konsumen mendapat keuntungan melalui peningkatan surplusnya dan kerugian produsen ini dapat diimbangi keuntungan konsumen. Hal ini akan dialami NM, mengingat tingginya tarif bea masuk komoditas pertanian yang mereka terapkan selama ini. Melalui mekanisme internal pendistribusian pendapatan di NM dengan sistem fiskal dan moneter yang efektif, sesungguhnya kerugian produsen hampir pasti akan mereka atasi kalau saja liberalisasi perdagangan mereka lakukan secara konsekuen. Namun, bagi petani produsen di NB termasuk Indonesia, liberalisasi ini membawa keuntungan (Tabel 9), ditunjukkan oleh perubahan surplus positif.

Tabel 9. Dampak Liberalisasi Perdagangan terhadap Perubahan Kesejahteraan (Juta AS\$)

Skenario	Perubahan Kesejahteraan	Negara Maju	Negara Berkembang	Indonesia
Harbinson 1	Surplus Konsumen	32.324,74	-1.382,12	-439,20
	Surplus Produsen	-18.236,33	3.576,12	387,44
	Kesejahteraan Total	9.654,73	1.774,98	-47,03
Harbinson 2	Surplus Konsumen	40.583,99	-8.761,84	-557,55
	Surplus Produsen	-50.806,25	8.419,94	469,34
	Kesejahteraan Total	16.188,19	1.087,89	-100,35
Usulan K 20	Surplus Konsumen	32.324,74	-1.382,12	-439,20
	Surplus Produsen	-18.236,33	3.576,12	387,44
	Kesejahteraan Total	9.645,73	1.775,98	-47,03

Sumber: Simulasi ATPSM Versi 3.

Secara keseluruhan skenario kebijakan liberalisasi berdampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Apabila mekanisme internal pendistribusian pendapatan belum efektif sebagaimana umumnya terjadi di NB, kesenjangan manfaat ini akan menimbulkan dampak sosial. Ini kemungkinan salah satu faktor penyebab liberalisasi perdagangan pertanian ditolak banyak pihak. Liberalisasi perdagangan lebih menguntungkan NM dibanding NB. Oleh

karena itu, agar liberalisasi memberi manfaat yang seimbang bagi NM dan NB semua anggota OPD harus mempunyai tekad yang sama dan tindakan nyata dalam merumuskan kebijakan perdagangan yang adil. Indonesia bersama dengan anggota K 33 berusaha mempengaruhi NM untuk mereformasi kebijakan perdagangan mereka.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Perlindungan yang diberikan oleh NM dalam bentuk BD kepada produsennya sangat besar nilainya dan menyebabkan ketidakadilan antar-pelaku ekonomi di pasar internasional. Penurunan tarif yang disertai penurunan BD hanya oleh NM dengan tidak mengubah SE-nya, tidak berdampak nyata bagi Indonesia. Penurunan BD oleh NM hanya akan menguntungkan konsumen di NM tersebut dan sebaliknya merugikan produsennya.

Kebijakan liberalisasi perdagangan menyebabkan peningkatan harga dunia, namun besarnya perubahan harga tersebut cenderung sama. Apabila harga dunia naik, konsumen di negara pengimpor, seperti Indonesia akan dirugikan, sebaliknya, produsen atau pengekspor sangat diuntungkan. Indonesia harus memperbaiki kinerja perdagangan dengan meningkatkan mutu dan volume produksi dalam negeri, terutama untuk produk pangan, agar pada tingkat tertentu dapat memenuhi kebutuhan sendiri tidak tergantung pasar dunia.

Penurunan tarif tanpa disertai penurunan BD dan SE di NM dan NB dan penurunan tarif usulan K 20 memberi dampak yang sama terhadap produksi, konsumsi, ekspor, dan impor komoditas pertanian. Penurunan tarif yang disertai dengan penurunan BD dan SE NM dan NB sekaligus berdampak lebih besar terhadap keempat indikator kinerja sektor pertanian tersebut. Kebijakan-kebijakan tersebut berdampak positif bagi kinerja sektor pertanian karena meningkatkan produksi pertanian Indonesia, ekspor pertanian, dan mengurangi volume impor. Namun, konsumen dalam negeri menderita kerugian.

Terdapat tiga komoditas penting yang mengalami perubahan nyata dalam produksinya, yaitu tomat, jeruk, dan gula halus. Daging sapi, gandum, apel, tembakau (primer dan olahan), dan karet tidak menunjukkan perubahan produksi sama sekali. Karet merupakan salah komoditas promosi ekspor andalan Indonesia. Hal ini berimplikasi bahwa komoditas karet tidak sensitif terhadap kejutan harga di pasar dunia. Peningkat mutu dan kinerja perdagangan menjadi kunci keberlanjutan industri karet nasional.

Liberalisasi perdagangan di NM akan menguntungkan konsumen dan merugikan produsennya. Kerugian produsen NM dapat diimbangi keuntungan konsumen. Bagi NB, termasuk Indonesia, liberalisasi perdagangan berdampak sebaliknya, merugikan konsumen dan menguntungkan produsen. Namun,

kerugian konsumen tidak dapat diimbangi keuntungan produsen. Agar liberalisasi perdagangan memberi manfaat yang seimbang bagi NM dan NB, maka semua anggota OPD harus mempunyai itikad baik merumuskan kembali kebijakan perdagangan yang adil. Penurunan tarif di NM berarti pemberian akses pasar yang lebih baik bagi produk pertanian dari NB. Pemotongan bantuan domestik dan subsidi ekspor bagi produsen di NM berarti awal tercapainya persaingan dagang yang adil dengan mitra dagang yang berasal dari NB. Itu semua yang harus diperjuangkan Indonesia dalam Putaran Doha bersama G 33.

DAFTAR PUSTAKA

- Hutabarat. B., M.H. Sawit, Supriyati, B. Rahmanto, A. Setyanto dan H. J. Purba, 2005. Penyusunan Bahan Advokasi Delegasi Indonesia dalam Perundingan Multilateral. Laporan Akhir. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Bogor.
- PTRI. 2005. Laporan Pertemuan Cairns Group dan G-20 di Jenewa pada tanggal 25 – 27 September 2005.
- UNCTAD. 2005. ATPSM. www.unctad.org/ (on line), 20 Mei 2005.
- Vanzetti, D. B. Graham. 2002. Simulating Agricultural Policy Reform with ATPSM. Trade Analysis Branch. UNCTAD. Geneva.
- WTO. 2004. Doha Work Programme: Decision Adopted by the General Council on 1 August 2004. www.wto.org/. (on line).

Lampiran : Komoditas/ Kelompok Komoditas Pertanian di dalam ATPSM versi 3

No	Name	No	Name
1	<i>Livestock</i>	18	<i>Citrus fruits</i>
2	<i>Bovine meat</i>	19	<i>Bananas</i>
3	<i>Sheep meat</i>	20	<i>Other tropical fruits</i>
4	<i>Pigmeat</i>	21	<i>Sugar, raw</i>
5	<i>Poultry</i>	22	<i>Sugar, refined</i>
6	<i>Milk, concentrate</i>	23	<i>Coffee, green</i>
7	<i>Butter</i>	24	<i>Coffee, proc</i>
8	<i>Cheese</i>	25	<i>Cocoa beans</i>
9	<i>Wheat</i>	26	<i>Cocoa, processed</i>
10	<i>Rice</i>	27	<i>Tea</i>
11	<i>Barley</i>	28	<i>Tobacco leaves</i>
12	<i>Maize</i>	29	<i>Tobacco, processed</i>
13	<i>Sorghum</i>	30	<i>Oilseeds, temperate</i>
14	<i>Pulses</i>	31	<i>Oilseeds, tropical</i>
15	<i>Tomatoes</i>	32	<i>Vegetables oils</i>
16	<i>Roots & tubers</i>	33	<i>Hides & Skin</i>
17	<i>Apples & pears</i>	34	<i>Cotton</i>
		35	<i>Rubber</i>